BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasikan adanya pihak-pihak yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori ini mucul karena adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri.

Perbedaan tujuan dan preferensi risiko antara agen dan prinsipal akan timbul manakala prinsipal tidak dapat dengan mudah memantau tindakan agen. Karena prinsipal tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja agen, prinsipal tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Situasi yang demikian disebut sebagai asimetri informasi. Jensen dan Meckling dalam Indrayati (2010) menggambarkan hubungan keagenan *(agency relationship)* sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang diterapkan antara pemilik perusahaan atau pemegang saham yang menggunakan agen untuk melakukan jasa yang menjadi kepentingan pemilik, dalam hal ini terjadi pemisahan

Secara garis besar, Jensen dan Meckling dalam Indrayati (2010) menggambarkan dua bentuk keagenan yaitu antara manajer dengan pemilik dan antara manajer dengan pemberi pinjaman *(bondholders)*. Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada agen dan hubungan ini juga perlu diatur dalam suatu kontrak yang biasanya menggunakan angka-angka akuntansi yang dinyatakan dalam laporan keuangan sebagai dasarnya. Pendesain kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan agen dan pemilik dalam hal terjadinya konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari teori keagenan.

2. Konservatisme Akuntansi

Konservatisme adalah sikap dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan *(outcome)* yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Sikap konservatisme juga mengandung makna sikap berhati-hati dalam menghadapi risiko dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Implikasi dari konsep ini terhadap pelaporan keuangan adalah bahwa pada umumnya akuntansi akan segera mengakui biaya atau rugi yang kemungkinan besar

pendapatan yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar (Suwardjono, 2005).

Konservatisme merupakan prinsip yang paling mempengaruhi penilaian dalam akuntansi. Namun konservatisme juga merupakan konsep yang kontroversial. Pemikiran serta bukti empiris menunjukkan masih terdapat kontroversi mengenai manfaat akuntansi yang konservatif. Ada penelitian yang menyatakan bahwa akuntansi yang konservatif tidak bermanfaat, namun ada pula penelitian yang menyatakan bahwa akuntansi yang konservatif bermanfaat.

Kritik akuntansi konservatisme menyatakan bahwa pada awalnya prinsip ini memang akan menyebabkan laba dan aktiva menjadi rendah, namun akhirnya akan membuat laba dan aktiva menjadi tinggi dimasa mendatang. Staubus dalam Mayangsari dan Wilopo (2002) berpendapat bahwa adanya berbagai cara untuk mendefinisikan dan mengiterpretasikan konservatisme merupakan kelemahan konservatisme. Di samping itu, konservatisme dianggap sebagai sistem akuntansi yang bias. Pendapat ini dipicu oleh pengertian mengenai konservatisme itu sendiri yang disampaikan oleh beberapa penelitian terdahulu, dimana akuntansi yang mengakui kerugian lebih cepat daripada pendapatan dan keuntungan, serta menilai aktiva dengan nilai terendah dan

Akuntansi konservatif tetap disarankan untuk digunakan. Hal ini dilihat dalam aturan-aturan yang ada dalam standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia (PSAK). Akuntansi konservatif akan menguntungkan mengenai kontrak-kontrak antara pihak-pihak dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Konservatisme dapat membatasi tindakan manajer untuk membesar-besarkan laba (manajemen laba) serta memanfaatkan informasi yang asimetri sehingga dapat mengurangi konflik yang terjadi antara manajemen dan para pemegang saham *(agency conflict)*. Para peneliti menyebutkan telah terjadi peningkatan konservatisme standar akuntansi secara global. Peningkatan itu disebabkan oleh meningkatnya tuntutan hukum, sehingga auditor dan manajer cenderung melindungi dirinya dengan selalu melaporkan angka-angka yang konservatif di dalam laporan keuangannya (Givoly dan Hayn dalam Mayangsari dan Wilopo, 2002).

Berdasarkan kontrak yang efisien, konservatisme akuntansi menyatakan bahwa besarnya laba yang diantisipasi merupakan fungsi langsung dari kemampuan perusahaan dalam mengestimasi laba dimasa mendatang. Secara intuitif, prinsip konservatisme ini bermanfaat karena dapat digunakan untuk memprediksi kondisi pada masa mendatang. Dengan kata lain, pemilihan suatu metode yang mendukung prinsip konservatisme memiliki *value relevance*. Logika ini dapat membantah kritik terhadap ketidakbergunaan laporan

keuangan yang berdasarkan pada prinsip konservatisme (Mayangsari dan Wilopo, 2002).

3. ***Good Corporate Governance***

a. Pengertian *Corporate Governance*

Beberapa institusi di Indonesia mengajukan definisi mengenai *Corporate Governance*. Seperti melalui situs lembaga IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*) dan FGDI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) yang mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengacu kepada pembagian kewenangan antara semua pihak yang menentukan arah dan *performance* suatu perusahaan (*www.iicg.org/glosarium*).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* merupakan serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sesuai dengan harapan para pihak yang berkepentingan lainnya. Dimana praktik tata kelola perusahaan yang nantinya memiliki dua hasil yaitu menjadi baik (*Good Corporate Governance*) atau tetap menjadi buruk (*Bad Corporate Governance*). Setiap perusahaan pasti menginginkan praktik

tata kelola yang mampu membuat kinerja perusahaan menjadi baik atau meningkat, maka perusahaan harus melaksanakan aturan-aturan yang dibuat pemerintah untuk menjadi pedoman dalam *Good Corporate Governance* (GCG). Selain itu dalam pengertian teori agensi makna *Corporate Governance* merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

b. Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Tujuan *GCG* pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak–pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders).* Berdasarkan keputusan Meneg BUMN No.117/M-MBU/2002 prinsip-prinsip utama dari *Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

1) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Prinsip pertanggungjawaban perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggungjawab terhadap lingkungan masyarakat maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati seperti yang tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan, sehingga dapat

terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen.*

2) *Accountability* (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Accountability merupakan prasyarat yang diperlukan perusahaan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Adanya transparansi dan kewajaran dalam kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam rapat umum pemegang saham, direksi, komisaris atau dewan pengawas, serta pemilik modal, merupakan salah satu cara yang paling efektif dan efisien yang akan mengurangi terjadinya konflik kepentingan dan memastikan terlaksananya pencapaian tujuan perusahaan yang tepat sasaran.

3) *Fairness* (Kewajaran)

Fairness adalah prinsip perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Secara sederhana kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*

yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

4) *Transparancy* (Transparansi)

Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang material dan relevan dengan cara dapat diakses dan mudah dipahami yang disajikan perusahaan.

Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, sehingga perusahaan diharapkan dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu.

5) *Independency* (Independen)

Independency adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara independen serta bebas dari segala bentuk tekanan dari pihak lain, sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat *diintervensi* oleh pihak lain.

c. Mekanisme *Corporate Governance*

Agar pelaksanaan *Corporate Governance* berjalan dengan baik, ada beberapa mekanisme *Corporate Governace* yang harus dilakukan oleh perusahaan. Mekanisme tersebut meliputi mekanisme pengendalian internal perusahaan dan mekanisme pengendalian eksternal.

Mekanisme pengendalian internal perusahaan adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan dengan membuat seperangkat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, *return* maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Mekanisme internal dapat berupa kepemilikan manajerial, struktur dewan direksi, komite audit, dan kompensasi eksekutif.

Sedangkan mekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan berdasarkan pasar, dapat berupa kepemilikan institusional, tingkat pendanaan dengan hutang (*debt financing*), pelaksanaan audit oleh auditor eksternal, dan pasar untuk kontrol perusahaan.

Dalam penelitian ini mekanisme *Corporate Governance* yang digunakan oleh penulis adalah:

1) Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan

lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*).

Pada dasarnya semua komisaris bersifat independen, dalam pengertian mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, tanpa pengaruh dari berbagai pihak lainnya. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) diantara berbagai kepentingan perusahaan dan kepentingan *stakeholder* sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Untuk lebih memantapkan efektivitas komisaris independen, jumlah komisaris independen paling sedikit 30% dari seluruh jumlah komisaris atau paling sedikit 1 (satu) orang (tertera pada peraturan dalam surat direksi nomor kep-305/BEJ/07/2004).

Salah satu fungsi utama dari komisaris independen adalah untuk menjalankan fungsi monitoring yang bersifat independen terhadap kinerja manajemen perusahaan. Keberadaan komisaris dapat menyeimbangkan kekuatan pihak manajemen terutama CEO (*Chief Executives Officer)* dalam pengelolaan perusahaan melalui fungsi monitoringnya (Wardhani, 2008). Selain itu komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan

terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait (Herawaty, 2008).

Dengan demikian, keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan sangatlah penting. Dengan komisaris independen, maka perusahaan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan meningkatkan pengawasan terhadap direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan manajer yang akan berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan.

2) Kepemilikan manajerial

Besar kecilnya jumlah kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat mengindifikasikan adanya kesamaan *(congruance)* kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Perusahaan dengan jumlah kepemilikan saham yang besar seharusnya mempunyai konflik keagenan yang rendah dan biaya keagenan yang rendah pula. Konflik keagenan yang rendah dapat direfleksikan dari tingginya tingkat perputaran aktiva perusahaan dan rendahnya beban operasi terhadap penjualan (Faizal, 2004).

Masalah keagenan timbul jika kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dijalankan secara terpisah. Pemilik (pemegang saham) bertujuan untuk memaksimumkan kekayaannya dengan melihat nilai sekarang dari arus kas yang dihasilkan oleh investasi perusahaan

sedangkan manajer bertujuan pada peningkatan pertumbuhan dan ukuran perusahaan. Kepemilikan manajerial akan membantu mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Namun, tingkat kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi juga dapat berdampak buruk terhadap perusahaan. Dengan kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer mempunyai hak voting yang tinggi sehingga manajer mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan (Putri dalam Rahmawati, 2010).

3) Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah yang tepat dari anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya. Menurut pedoman umum *Corporate Governance* Indonesia, jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan KNKG dalam Indrayati (2006) ukuran dewan komisaris yang tepat, dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

a) Ukuran dewan direksi

Dalam suatu perusahaan, jumlah dewan direksi dan dewan komisaris berbeda-beda. Jumlah dewan komisaris yang lebih besar dapat memberikan keuntungan ataupun kerugian dalam perusahaan. Misalnya, dalam suatu rapat antara dewan komisaris dan dewan direksi, terdapat kemungkinan adanya perbedaan pendapat di antara kedua pihak tersebut. Apabila jumlah anggota dewan komisaris lebih sedikit dari jumlah anggota dewan direksi, maka akan terdapat kemungkinan dewan komisaris mengalami tekanan psikologis. Oleh karena itu jumlah anggota dewan komisaris harus lebih banyak atau paling tidak sama dengan jumlah anggota dewan direksi.

b) Industri dan jenis keahlian yang dibutuhkan

Jumlah anggota dewan komisaris yang tepat juga tergantung dari jenis keahlian yang dimiliki dari suatu industri. Kemampuan dewan komisaris dalam mengawasi dan mengatasi masalah yang muncul sangat diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan anggota dewan komisaris yang benar-benar memiliki keahlian dalam bidangnya. Sehingga jumlah anggota dewan komisaris ditentukan oleh jumlah jenis keahlian yang diperlukan dalam suatu industri.

c) Risiko menyeluruh yang dihadapi

Risiko menyeluruh yang dihadapi perusahaan juga menentukan ukuran dewan komisaris. Terdapat pandangan bahwa semakin banyak

yang memikirkan dan memantau risiko yang dihadapi perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan dapat mengatasi ancaman yang dibawa risiko tersebut, walaupun tentunya dengan mempertimbangkan kendala yang ada dan kemampuan perusahaan.

d) Komite yang ada

Dewan komisaris juga memiliki wewenang untuk membentuk komite audit, komite remunerasi, komite nominasi, komite kebijakan risiko, dan komite kebijakan *corporate governance*. Komite-komite yang dibentuk tersebut memiliki tujuan supaya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris semakin efektif. Komite tersebut merupakan bagian dari dewan komisaris yang beranggotakan komisaris sendiri maupun pihak lain yang independen. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah komite yang ada di dalam perusahaan maka akan semakin banyak pula jumlah anggota komisaris yang dibutuhkan untuk dapat menjadi anggota komite-komite yang ada.

4) Kualitas Komite Audit

Komite audit adalah salah suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggungjawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *Corporate Governance* terutama transparansi dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif (Tiagar dalam Suaryana

2005). Komite audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektifitas, tanggungjawab, keterbukaan dan objektifitas.

Dengan adanya komite audit dalam suatu perusahaan, maka proses pelaporan keuangan perusahaan akan termonitor dengan baik. Oleh karena itu keberadaan komite audit ini akan mendorong penggunaan prinsip konservatisme yang lebih tinggi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit ini akan meningkatkan kualitas keseluruhan dari proses pelaporan keuangan perusahaan dengan penggunaan prinsip konservatisme.

5) Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan sesuatu yang abstrak sehingga sulit diukur dan hanya dapat dirasakan oleh para pengguna jasa audit, sehingga sampai saat ini tidak ada definisi yang seragam mengenai kualitas audit tersebut. (De Angelo dalam Kusharyanti 2003) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi), sementara tindakan melaporkan salah saji tegantung pada independensi auditor.

Kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Beberapa penelitian seperti De Angelo, Goldman & Barley, Nichols & Price dalam

Irmawati (2010) umumnya mengasumsikan bahwa auditor dengan kemampuannya akan dapat menemukan suatu pelanggaran dan kuncinya adalah auditor tersebut harus independen. Tetapi tanpa informasi tentang kemampuan teknik (seperti pengalaman audit, pendidikan, profesionalisme, dan struktur audit perusahaan), kapabilitas dan independensi akan sulit dipisahkan.

Kualitas audit bukanlah merupakan sesuatu yang dapat langsung diamati. Persepsi terhadap kualitas audit selanjutnya berkaitan dengan nama auditor. Dalam hal ini nama baik perusahaan merupakan gambaran yang paling penting. Baik secara teori ataupun empiris, kualitas auditor seringkali diukur dengan menggunakan ukuran kantor akuntan publik.

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Komisaris Independen dengan Tingkat Konservatisme Akuntansi

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, dan perusahaan itu sendiri baik dalam bentuk hubungan bisnis maupun kekeluargaan.

Anggota dewan komisaris independen harus bertindak berdasarkan

tanggung jawab pengelolaan dewan, yaitu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) dan kewajiban kesetiaan (*duty of loyalty*). Dalam kewajiban kehati-hatian, dewan diharapkan bertindak berdasarkan informasi yang cukup, itikad baik dengan seksama (*due diligent*) dan hati-hati. Di banyak negara, telah terdapat suatu standar yang menjadi referensi mengenai perilaku dewan yang dapat dianggap merupakan tindakan yang hati-hati (*prudent*) dalam suatu keadaan tertentu. Tindakan ini adalah tindakan yang selaras dengan konsep konservatisme akuntansi, yaitu kehati-hatian terhadap ketidakpastian yang akan dihadapi oleh perusahaan.

Salah satu fungsi utama dari komisaris independen adalah untuk menjalankan fungsi monitoring yang bersifat independen terhadap kinerja manajemen perusahaan. Keberadaan komisaris independen akan menyeimbangkan kekuatan pihak manajemen (terutama CEO) dalam pengelolaan perusahaan melalui fungsi monitoringnya (Wardhani, 2008). Dalam menjalankan fungsinya, komisaris independen akan sangat membutuhkan informasi yang akurat dan berkualitas.

Oleh karena itu, konservatisme akuntansi merupakan alat yang sangat berguna bagi dewan komisaris (terutama komisaris independen) dalam menjalankan fungsi mereka sebagai pengambil keputusan dan pihak yang memonitor manajemen. Dewan komisaris yang kuat yang didominasi oleh komisaris independen akan mensyaratkan informasi yang lebih berkualitas

menyeimbangkan kekuatan pihak manajemen (terutama CEO) dalam pengelolaan perusahaan melalui fungsi monitoringnya (Wardhani, 2008). Dalam menjalankan fungsinya, komisaris independen akan sangat membutuhkan informasi yang akurat dan berkualitas.

Oleh karena itu, konservatisme akuntansi merupakan alat yang sangat berguna bagi dewan komisaris (terutama komisaris independen) dalam menjalankan fungsi mereka sebagai pengambil keputusan dan pihak yang memonitor manajemen. Dewan komisaris yang kuat yang didominasi oleh komisaris independen akan mensyaratkan informasi yang lebih berkualitas, sehingga akan cenderung untuk lebih menggunakan prinsip akuntansi yang konservatif. Karakteristik dewan yang memiliki insentif monitoring yang lemah akan memberikan kesempatan lebih besar untuk menggunakan prinsip akuntansi yang lebih agresif dan kurang konservatif (Ahmed dan Duellman, 2007).

Penelitian Wardhani (2008) menyatakan bahwa semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen terhadap total jumlah komisaris maka semakin besar pula tingkat konservatisme akuntansi yang diukur dengan ukuran pasar. Penelitian Innarotul (2008) menyimpulkan bahwa secara simultan komisaris independen mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian Tjiptokesono (2010) juga menyatakan

bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi.

Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu, maka dibentuklah hipotesis berikut ini :

H1: Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan.

2. Kepemilikan Manajerial dengan Tingkat Konservatisme Akuntansi

Kepemilikan saham oleh komisaris yang terafiliasi ini dapat berperan sebagai fungsi monitor dalam proses laporan keuangan dan juga dapat menjadi faktor pendorong dilakukannya ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas (Wardhani, 2008). Apabila kepemilikan saham oleh komisaris yang terafiliasi menjalankan fungsi monitoringnya dengan baik maka prinsip yang digunakan pun akan lebih konservatif. Namun apabila kepemilikan mereka tersebut justru mendorong dilakukannya pengambilalihan terhadap perusahaan maka prinsip akuntansi yang digunakan akan cenderung lebih agresif dan apabila hal tersebut terjadi maka fungsi monitoring yang dilakukan oleh komisaris yang terafiliasi menjadi tidak efektif.

Jensen dan Meckling dalam Wardhani (2008) membentuk suatu teori yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen akan

dimiliki oleh manajemen maka semakin kuat motivasi mereka untuk bekerja dalam meningkatkan nilai saham perusahaan. Biaya keagenan timbul karena usaha manajer untuk memindahkan kekayaan perusahaan pada dirinya dan mengabaikan peran utamanya, yaitu mengatur perusahaan secara efektif serta menciptakan nilai bagi pemegang saham LaFond dan Roychowdhury dalam Rahmawati (2010).

Wu (2006) dalam Wardhani (2008) juga meneliti dampak dari kepemilikan manajerial terhadap kualitas laba yang salah satu ukurannya adalah konservatisme dalam pelaporan keuangan. Ia menghipotesiskan akuntansi yang lebih konservatif akan digunakan karena kreditor yang rasional akan mengekspektasikan manajer dengan kepemilikan yang tinggi akan lebih sejalan dengan pemegang saham sehingga kreditor tersebut butuh mekanisme tertentu untuk melindungi nilai investasi mereka. Selain itu, pemegang saham juga akan melihat adanya potensi dilakukannya manajemen laba dengan semakin besarnya kepemilikan manajerial tersebut sehingga menuntut tingkat konservatisme yang tinggi untuk menghindari oportunistik jangka pendek dari manajer.

Hasil penelitian Wu dalam Wardhani (2008) menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan manajerial yang lebih tinggi menunjukkan pola yang lebih konservatif dalam pelaporan pendapatannya. Hal ini menunjukkan bukti bahwa ada hubungan yang positif

antara kepemilikan manajerial dengan tingkat konservatisme dalam perusahaan. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Ahmed dan Duellman (2007), Rose *et al.* dalam Dwiyana (2007), dan Arif (2009) yang menemukan adanya hubungan yang positif kepemilikan manajerial terhadap tingkat konservatisme. Innarotul (2008) didalam penelitiannya tentang mekanisme *good corporate governance* terhadap konservatisme, juga menemukan pengaruh yang kuat dan signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap konservatisme. Hal ini menunjukkan bukti bahwa ada hubungan yang positif antara kepemilikan manajerial dengan tingkat konservatisme dalam perusahaan.

Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu, maka dibentuklah hipotesis berikut ini :

H2: Kepemilikan saham oleh komisaris yang terafiliasi dan direksi (manajerial) berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan.

3. Kualitas Komite Audit dengan Tingkat Konservatisme Akuntansi

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen dan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan Bradbury *et al.* dalam Suaryana, (2005). Tugas komite audit meliputi mengalah kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh

perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan.

Di dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit menyediakan komunikasi formal antara dewan komisaris, manajemen, auditor eksternal dan auditor internal. Masalah komunikasi merupakan salah satu aspek yang cukup penting dalam keberhasilan komite audit di dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu komite audit harus meningkatkan komunikasi dengan dewan komisaris, manajemen, auditor internal dan auditor ekternal dalam bentuk pertemuan rapat komite audit. Adanya komunikasi yang lancar antara komite audit dengan berbagai pihak tersebut dapat menunjukkan eksistensi komite audit dan dapat meringankan tugas komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan.

Komite audit akan mempengaruhi kebijakan yang diambil perusahaan berkaitan dengan prinsip yang digunakan dalam pelaporan keuangan, termasuk didalamnya konservatisme. Diharapkan dengan semakin berkualitasnya komite audit melalui komunikasi yang dijalankan oleh pihak-pihak yang terkait, maka proses pelaporan keuangan perusahaan akan termonitor dengan baik. Komite audit ini dapat memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan perusahaan yang akurat dan berkualitas. Oleh karena itu

komite audit ini akan mendorong penggunaan prinsip konservatisme yang lebih tinggi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan.

Krishnan dan Visuanathan dalam Wardhani (2008) membuktikan bahwa latar belakang keahlian dari komite audit berkaitan secara positif terhadap konservatisme. Wardhani (2008) di dalam penelitiannya menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang cukup kuat dan signifikan terhadap konservatisme. Penelitian Turkey dan Zaman dalam Setyapurnama dan Norpratiwi (2006) menunjukkan adanya hubungan positif antara eksistensi komite audit (pertemuan rapat komite audit) dengan kualitas laporan keuangan dan kinerja perusahaan. Dengan demikian, eksistensi dari komite audit akan menjadikan komite tersebut menjadi lebih berkualitas sehingga akan meningkatkan kualitas dari proses pelaporan perusahaan dengan penggunaan prinsip konservatisme.

Berdasarkan analisis dan temuan penelitian terdahulu, maka dibentuklah hipotesis berikut ini :

H3: Kualitas komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan.

4. Ukuran Dewan Komisaris dengan Tingkat Konservatisme Akuntansi

Ukuran dewan komisaris merupakan elemen yang penting dari karakteristik dewan komisaris yang mempengaruhi tingkat konservatisme

akuntansi. Ukuran dewan komisaris yang tidak seimbang dengan ukuran dewan direksi akan menyebabkan komisaris mengalami kesulitan dalam berdiskusi dengan dewan direksi dan mengawasi kinerja perusahaan. Dewan komisaris akan lebih menginginkan penerapan prinsip akuntansi yang konservatif untuk mencegah perilaku yang menyimpang dari direksi dan manajer. Menurut Coller dan Gregory dalam Sembiring (2005) semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executives Officer* (CEO) dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen.

Menurut Klein dalam Ahmed dan Duelman (2007), ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan menyebabkan tugas setiap anggota dewan komisaris menjadi lebih khusus karena terdapat komite-komite yang lebih khusus dalam mengawasi perusahaan. Spesialisasi yang lebih besar tersebut dapat menunjukkan pengawasan yang lebih efektif. Oleh sebab itu, diperlukan jumlah anggota dewan komisaris yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan supaya proses monitoring lebih efektif. Semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin besar kekuatan dari dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dan diharapkan penggunaan akuntansi yang konservatif akan semakin tinggi pula, karena prinsip konservatisme dapat menghasilkan angka-angka laba yang berkualitas.

Penelitian Lara *et al.* (2005) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki dewan yang kuat sebagai mekanisme *Good Corporate Governance* mensyaratkan tingkat konservatisme yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan dewan yang lemah. Rahmawati (2010) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi dengan menggunakan ukuran akrual.

Berdasarkan analisis dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H4 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan.

5. Kualitas Audit dengan Tingkat Konservatisme Akuntansi

Kualitas audit yang tinggi mempunyai peran penting dalam memberikan kepastian bahwa laporan keuangan yang didalamnya terdapat informasi mengenai laba perusahaan disajikan wajar dan dapat menyelesaikan proses audit nya dengan tepat waktu. Hussainey dalam Irmawati (2010) menyatakan bahwa kantor akuntan besar menyediakan kualitas laporan keuangan yang lebih tinggi daripada kantor akuntan kecil. Lennox dalam Riyatno (2007) melihat dua penjelasan mengenai hubungan yang positif antara ukuran KAP dan kualitas audit, yaitu alasan reputasi yang dimiliki oleh KAP. Penelitiannya membuktikan kesesuaian dengan hipotesis reputasi

yang beagumen bahwa KAP besar mempunyai insentif lebih besar untuk mengaudit lebih akurat karena mereka memiliki lebih banyak hubungan spesifik dengan klien yang akan hilang jika mereka memberikan laporan yang tidak akurat. Selain itu karena KAP besar memiliki sumber daya atau kekayaan yang lebih besar daripada KAP kecil, maka mereka terancam oleh tuntutan hukum pihak ketiga yang lebih besar bila menghasilkan laporan audit yang tidak akurat.

Tuntutan hukum yang semakin ketat akan berpotensi menimbulkan litigasi bila perusahaan melakukan pelanggaran sehingga akan semakin mendorong manajer untuk bersikap hati-hati dalam menerapkan akuntansinya. Demikian juga, bagi auditor yang memeriksa laporan keuangan cenderung lebih konservatif. Karena kesalahan dalam memperkirakan keuntungan lebih berbahaya dibanding kesalahan karena memperkirakan kemungkinan rugi.

Basu dalam Lee *et al.*(2002) menyatakan bahwa pada umumnya auditor yang berkualitas tinggi akan lebih konservatif dalam penyajian laporan keuangan. Selain itu penelitian Lee *et al.*(2002) dan Clarkson*et et al.* (2003) menyimpulkan bahwa untuk menghindari risiko litigasi, maka *big 6 auditors* lebih konservatif dalam memeriksa laporan keuangan dibandingkan dengan *non big 6 auditors.* Krishnan (1999) menyimpulkan bahwa *big 6 auditors* lebih konservatif dalam memeriksa laporan keuangan dibandingkan dengan *non big 6 auditors.* Wang dalam Lee *et al.* (2007) juga mengungkapkan

bahwa KAP besar mendorong konservatisme pada negara-negara dimana perlindungan investor tinggi.

Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu, maka dibentuklah hipotesis berikut ini :

H5: Kualitas audit berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi

C. Model Penelitian

Mekanisme *Corporate Governance*
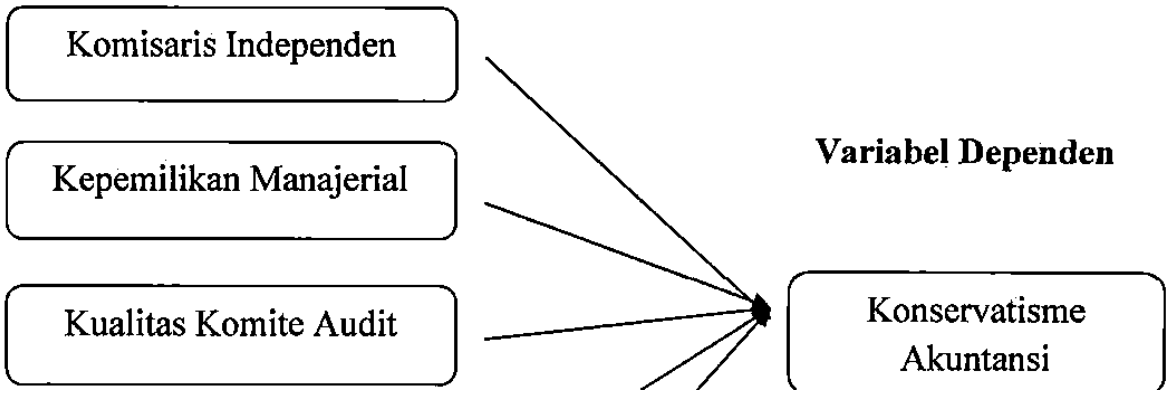
Variabel Independen